

PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI KORBAN PERANG DI PALESTINA TAHUN 2021-2025

Dedy Dwi Cahyadi¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This study examines Indonesia's role in assisting war victims in Palestine during the 2021–2025 period, amidst escalating conflicts that began with the Sheikh Jarrah incident and clashes at Al-Aqsa Mosque, culminating in the large-scale war of October 2023. It outlines the dynamics of the Israel–Palestine conflict, ceasefire efforts, and Indonesia's role through political diplomacy and humanitarian aid covering health, food, education, and infrastructure reconstruction sectors. Applying the theories of liberalism, free and active foreign policy, diplomacy, and human security, the study analyzes the impacts and challenges faced by Indonesia in delivering aid under the constraints of blockades and Palestinian political fragmentation. The findings reveal that Indonesia's role is consistent and strategic, albeit limited in altering the political situation, yet providing tangible contributions to saving lives, restoring infrastructure, and keeping the Palestinian issue on the international agenda.

Keywords: Indonesia, Palestine, Humanitarian Aid, Diplomacy

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Indonesia dalam menangani korban perang di Palestina selama periode 2021–2025, di tengah eskalasi konflik yang dimulai dari peristiwa Sheikh Jarrah dan bentrokan di Masjid Al-Aqsa hingga perang besar pada Oktober 2023. Penelitian ini menguraikan dinamika konflik Israel–Palestina, upaya gencatan senjata, dan peran Indonesia melalui diplomasi politik serta bantuan kemanusiaan yang mencakup sektor kesehatan, pangan, pendidikan, dan rekonstruksi infrastruktur. Dengan menggunakan pendekatan teori liberalisme, kebijakan luar negeri bebas aktif, diplomasi, dan keamanan manusia, penelitian ini menganalisis dampak dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyalurkan bantuan di tengah blokade dan fragmentasi politik Palestina. Hasilnya menunjukkan bahwa peran Indonesia bersifat konsisten dan strategis, meskipun terbatas dalam mengubah situasi politik, namun memberikan kontribusi nyata bagi penyelamatan nyawa, pemulihan infrastruktur, serta menjaga isu Palestina di panggung internasional.

Kata Kunci: Indonesia, Palestina, Bantuan Kemanusiaan, Diplomasi

PENDAHULUAN

Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina hingga saat ini tetap menjadi permasalahan yang kompleks di kawasan Timur Tengah. Selama puluhan tahun, konflik ini belum memperoleh solusi yang memadai bagi kedua belah pihak. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, konfrontasi militer antara Israel dan Palestina masih terus berlanjut. Israel merujuk kepada peristiwa yang terjadi pada tahun 1948 sebagai Perang Kemerdekaan, sementara pihak Palestina dianggap sebagai "*al nakba*," yang berarti bencana (Alinea, 2023). Pada awal terjadinya perang, negara Israel menghadapi tantangan yang signifikan dalam menghadapi serangan dari pasukan-pasukan Arab. Angkatan Udara Mesir melaksanakan serangan udara terhadap Tel Aviv, sementara pasukan darat Mesir sukses mendekati Tel Aviv hingga sejauh 35 kilometer atau 20 mil. Beberapa kibbutzim (komunitas kolektif yang umumnya berbasis pertanian) di daerah Negev berada di bawah pengawasan ketat pasukan Arab. Selain itu, jalur penghubung antara Yerusalem dan Tel Aviv juga dijaga secara ketat oleh pasukan dari Transjordan.

Sebelum pendirian negara Israel di Timur Tengah, masyarakat Yahudi telah lama memiliki hasrat untuk menguasai tanah Palestina. Berbagai langkah telah diambil dalam upaya mewujudkan aspirasi tersebut, mulai dari perjanjian Balfour yang dibuat di Inggris, pembelian tanah milik penduduk Palestina, hingga berbagai upaya lainnya. Seiring dengan meningkatnya provokasi yang dilakukan oleh kelompok zionis Israel, umat Islam dari berbagai kalangan senantiasa berusaha untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan di Palestina. Mereka berjuang untuk menuntut penghapusan perjanjian Balfour yang dinilai mengandung ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat Palestina, penghentian imigrasi Yahudi, penghentian penjualan tanah kepada pihak Yahudi, serta pendirian pemerintahan nasional Palestina yang dipilih melalui mekanisme parlementer sebagai refleksi dari keinginan sejati masyarakat. Selain itu, mereka juga mendorong diadakannya negosiasi dengan Inggris untuk mencapai kesepakatan yang pada akhirnya dapat mengarah pada pembebasan Palestina.

Peristiwa Perang Enam Hari yang terjadi pada tahun 1967 membawa dampak signifikan bagi bangsa Palestina, terutama dengan dikuasainya wilayah Tepi Barat Palestina dan Jalur Gaza. Dengan penguasaan wilayah tersebut, Israel mulai mendominasi kekuasaan warga Palestina. Kehadiran bangsa Yahudi di wilayah Palestina dapat dipahami sebagai sama dengan kehadiran bangsa kolonial di daerah tersebut (Mukhaer, 2023). Hal berikutnya yang terjadi adalah penaklukan dan penguasaan atas tanah serta harta benda oleh bangsa Yahudi terhadap Palestina. Sebenarnya, penjajahan oleh bangsa Yahudi di atas tanah Palestina telah berlangsung sejak tahun-tahun sebelum Masehi. Bangsa Yahudi sendiri sering mengalami perjuangan dan tantangan, mulai dari serangan bangsa Babilonia, Persia, hingga Romawi. Sementara itu, pada era modern ini, bangsa Yahudi berusaha untuk mengulangi sejarah masa lalunya dengan mencoba menduduki wilayah Palestina. Tidak hanya sekadar menduduki, tetapi juga mendirikan sebuah negara di wilayah tersebut dengan keyakinan bahwa Palestina merupakan tanah air yang dijanjikan, atau yang dikenal sebagai "*promised land*".

Memasuki tahun 1980, masyarakat Muslim di Palestina bangkit dan bersatu dengan tujuan untuk membebaskan diri dan mempertahankan hak mereka dari cengkeraman Israel. Gerakan ini dikenal dengan sebutan Intifadah I, yang berlangsung hingga tahun 1993. Aksi pembebasan tersebut mengalami penurunan setelah ditandatanganinya Perjanjian Oslo, yang mengedepankan tuntutan perdamaian dan, secara ironis, memberikan izin bagi rakyat Israel untuk hidup secara bebas di Palestina. Meskipun Perjanjian Oslo telah disepakati, Israel tetap melanjutkan tindak penindasan terhadap masyarakat Muslim Palestina.

Kekerasan yang terus dilakukan oleh Israel telah mendorong munculnya suatu perlawanan, yang dikenal dengan gerakan intifadhah. Pada awalnya, gerakan ini terbatas di daerah-daerah terpencil di Tepi Barat dan Gaza. Intifadhah identik dengan perlawanan yang menggunakan batu sebagai bentuk perlawanan terhadap militer Israel. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini melahirkan gerakan perlawanan yang lebih terorganisir, yaitu Hamas. Hamas merupakan suatu gerakan yang berkembang dari intifadhah sebagai upaya untuk melawan zionisme Israel. Masyarakat Muslim Palestina terus berjuang untuk mempertahankan diri dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman negara Israel yang berlandaskan ideologi Yahudi. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gerakan, organisasi, dan tokoh pejuang yang silih berganti. Fatah, Hamas, dan PLO (*Palestine Liberation Organization*) merupakan beberapa contoh dari sekian banyak gerakan rakyat Palestina yang berfungsi sebagai wadah perjuangan mereka untuk melawan Israel.

Gerakan rakyat Palestina sejak awal memiliki hubungan yang erat dengan gerakan protes yang bergantung pada penggunaan kekerasan. Protes ini merupakan manifestasi dari reaksi rakyat Palestina terhadap penjajahan yang diterapkan oleh Israel. Tindakan yang diambil adalah upaya untuk menuntut keadilan dari bangsa Israel dan secara umum dari bangsa-bangsa

Barat. Kekerasan dapat timbul sebagai akibat dari perilaku kekuasaan yang melakukan tindakan-tindakan represif dalam menerapkan kebijakannya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan situasi yang terjadi di Palestina. Kekerasan yang dilakukan oleh penduduk Palestina pada dasarnya merupakan respons terhadap kekerasan yang dikerahkan oleh penguasa, baik yang dilakukan oleh Israel maupun oleh negara-negara Barat yang mendukung Israel.

Harakat Al-Muqawwamat Al-Islamiyah (Hamas) merupakan sebuah gerakan perlawanan Islam yang bernaung dalam kelompok militer dengan mayoritas anggotanya bermazhab Sunni, yang kemudian berkembang menjadi partai politik di Palestina. Hamas didirikan pada tanggal 14 Desember 1987 oleh Syeikh Ahmad Yassin, Abdel Aziz al-Rantissi, Muhammad Taaha, Ibrahim al-Bazuri, Muhammad Syamah, Abdul Fatah Dakhon, Isa an-Nasyr, dan Shalah Syahadah. Pada awalnya, Hamas merupakan bagian dari Ikhwanul Muslimin (IM) di Palestina, terutama selama periode intifadlah yang berlangsung antara tahun 1987 hingga 1993. Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan pelopor gerakan Islam modern yang didirikan oleh Hasan Al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Pemikiran Ikhwanul Muslimin menekankan pemahaman Islam secara benar dan komprehensif dalam pelaksanaannya di semua aspek kehidupan.

Hamas dikenal sebagai gerakan anti-Israel yang memilih melakukan perlawanan secara gerilya. Pimpinan Hamas, Syeikh Ahmad Yasin, merupakan seorang penganut pemikiran Ikhwanul Muslimin. Awalnya, Ikhwanul Muslimin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) melalui Fatah. Fatah sendiri, yang didirikan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin di Jalur Gaza, kemudian mengalami perubahan arah di bawah kepemimpinan Yaser Arafat, yang mengalihkan fokus perjuangan dari landasan agama menuju ideologi nasionalis.

Pada masa transisi sebelum diakui sebagai partai politik, Hamas, yang memiliki akar ideologi dari Ikhwanul Muslimin, kembali beraktivitas di medan pertempuran dengan mendirikan sebuah sayap militer yang dinamakan "Mujahid Palestina" (Mujahidun Filisthiniyyun) di Jalur Gaza di bawah kepemimpinan Syeikh Ahmad Yasin. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1981 hingga 1987, yang dipicu oleh serangan brutal Israel terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Lebanon serta peristiwa pembantaian di Shabra dan Shatilla oleh kelompok Maronit Kristen yang didukung oleh Israel, yang menyebabkan lebih dari 700 warga Palestina kehilangan nyawa. Berdirinya sayap militer Hamas mencerminkan ketidakpercayaan Ikhwanul Muslimin terhadap PLO dan Fatah, yang dianggap semakin lemah dan mengendur di hadapan tentara Israel serta tekanan dari negara-negara pendukung Israel (Klein, 1996).

Hamas tidak terbentuk secara kebetulan; terdapat beberapa faktor yang mendorong kelahiran organisasi ini. Pertama, penolakan bangsa Palestina terhadap kehadiran Israel. Dalam pandangan bangsa Palestina, Israel dianggap sebagai turis yang mengunjungi Palestina dan harus kembali ke negara asalnya. Namun, kenyataannya, bangsa Israel tidak hanya menetap tetapi juga mendirikan negara secara permanen di Palestina. Situasi ini jelas menimbulkan penolakan dari bangsa Palestina, karena dianggap sebagai bentuk penjajahan. Penolakan terhadap Israel ini kemudian ditandai dengan munculnya berbagai gerakan anti-Israel.

Kedua, kebijakan-kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh Israel. Israel secara sengaja mengeluarkan berbagai kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap bangsa Palestina. Tindakan diskriminatif ini mengakibatkan Palestina tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dampak lainnya adalah bangsa Palestina berada pada posisi sebagai warga negara kelas dua, yang ditunjukkan dengan minimnya fasilitas hidup yang mereka terima. Mereka juga dijadikan sebagai buruh di tanah mereka sendiri, bekerja pada proyek-proyek pembangunan Israel dengan imbalan yang sangat

rendah. Ketiga, ketidakpuasan yang dirasakan terhadap kinerja PLO juga menjadi salah satu pendorong bagi berdirinya Hamas.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dianggap semakin lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi tekanan yang diberikan oleh Israel. Awalnya, PLO menempuh jalur perlawanan fisik dan bersenjata, namun kemudian beralih pada metode perjuangan yang lebih damai melalui diplomasi. Sayangnya, perundingan yang dilakukan oleh PLO terbukti tidak efektif, mengingat Israel telah berkali-kali melanggar kesepakatan yang telah disepakati, sehingga menempatkan posisi bangsa Palestina dalam keadaan yang semakin terdesak. Selain itu, di kalangan para pemimpin PLO sendiri terjadi persaingan untuk merebut posisi dan kekuasaan, yang disertai dengan maraknya praktek korupsi. Keadaan ini mengakibatkan penderitaan yang dialami bangsa Palestina akibat kejahatan Israel semakin terabaikan.

Sejak dibentuk, Hamas merupakan fraksi yang cukup dinamis dan mampu menarik perhatian penduduk Palestina. Dalam piagamnya, organisasi ini menetapkan bahwa ia "menganggap Islam sebagai jalannya, yang dijadikan sebagai landasan ide, konsepsi, dan persepsi. Kepada Islam-lah gerakan ini berpedoman dan dari-Nya meminta petunjuk dalam perjalanannya." Selain itu, Hamas memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan Palestina, mendirikan negara Islam di wilayah Palestina, serta menggalakkan pendidikan yang universal bagi generasi mendatang dalam rangka merealisasikan cita-cita yang diimpikan.

Dukungan dari rakyat adalah kekuatan terbesar bagi Hamas. Pasca kemunculan Hamas, mereka mengeluarkan anggaran dasar demi memberikan penekanan kembali akan prinsip-prinsipnya. Hamas mengumumkan tujuan-tujuan strategisnya, beberapa diantaranya:

- Perebutan kembali seluruh tanah Palestina dari sungai hingga laut dan pendirian negara Islam di tanah Palestina.
- Menggerakkan bangsa-bangsa Arab dan dunia Muslim untuk bersatu peduli akan permasalahan Palestina melalui sebuah program berlatar belakang perlawanan dan pembebasan-demi menggapai kesatuan nasional.
- Berdiri melawan upaya normalisasi okupasi Israel dan menghentikan praktek Imperialisme Israel. Gerakan-gerakan Islam di Palestina semakin populer.

Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Palestina memotivasi Indonesia untuk terus membantu serta mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Indonesia berperan secara konsisten dalam memberikan bantuan kepada korban agresi yang dilakukan oleh Israel, serta menuntut pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina di forum internasional. Indonesia aktif terlibat dalam organisasi-organisasi seperti PBB, Gerakan Non-Blok (GNB), dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menyuarakan isu-isu terkait Palestina.

Salah satu upaya utama dalam mendukung kemerdekaan Palestina adalah melalui OKI, yang memiliki sejarah panjang terkait dukungan tersebut dan diakui sebagai organisasi penting bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, dalam mengekspresikan perjuangan kemerdekaan Palestina. Indonesia secara konsisten menyerukan penyelesaian dua negara, yang memungkinkan Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan dalam suasana perdamaian dan keamanan.

Melalui jalur diplomasi, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina melalui berbagai program, termasuk yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dana Palestina untuk Pembangunan (PPD). Bantuan yang diberikan mencakup pengiriman pangan, obat-obatan, dan peralatan medis. Upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia mencakup pemberian bantuan baik berupa materi maupun jasa.

Ketegangan yang terus berlanjut antara Palestina dan Israel, disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta memperburuk kondisi kemanusiaan, menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mencapai perdamaian. Meskipun banyak tantangan yang

dihadapi, Indonesia tetap memegang peranan yang signifikan dalam penanganan korban perang pasca konflik Israel dan Palestina. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut peran Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada konflik Israel Palestina.

KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik ini menggunakan empat pendekatan teoritis utama untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Pertama, teori liberalisme yang menekankan pentingnya perdamaian dan kerjasama internasional melibatkan tidak hanya aktor negara tetapi juga aktor non-negara dalam mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan global termasuk konflik internasional. Kedua, konsep kebijakan luar negeri yang mencerminkan kekuatan negara dan eksistensinya dalam sistem internasional, khususnya Politik Bebas Aktif Indonesia yang memberikan fleksibilitas dalam berinteraksi dengan berbagai pihak tanpa mengorbankan kedaulatan nasional melalui diplomasi bilateral dan multilateral serta penolakan terhadap intervensi asing.

Ketiga, teori diplomasi sebagai metodologi pelaksanaan kebijakan luar negeri melalui perundingan dan komunikasi antara wakil-wakil yang diakui, yang merupakan cara berkomunikasi untuk mencapai tujuan nasional dan memperoleh dukungan internasional terhadap prinsip-prinsip yang dianut suatu negara. Keempat, konsep *Human Security* yang diperkenalkan UNDP tahun 1994 mengubah paradigma keamanan dari yang berorientasi negara menjadi berpusat pada individu, mencakup tujuh dimensi keamanan (ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik) dengan prinsip *freedom from fear*, *freedom from want*, dan *freedom from indignity* (Adinda FA, 2019).

Pendekatan *Human Security* sangat relevan dalam konteks konflik Israel-Palestina karena menyoroti dampak langsung terhadap warga sipil dan pelanggaran hak-hak fundamental. Indonesia memanfaatkan kerangka ini untuk memperkuat posisi diplomatiknya dalam membela hak-hak rakyat Palestina melalui berbagai forum internasional seperti PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan solidaritas global yang menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali dan memahami fenomena kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam menjelaskan fenomena sosial politik secara mendalam melalui penggabungan berbagai sumber data. Desain penelitian menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan data penelitian secara faktual dan akurat tanpa membuat generalisasi, sebagaimana dijelaskan Sugiyono, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan melalui penelaahan dokumen, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber literatur dianalisis secara kritis dan menyeluruh untuk mendukung argumentasi dan gagasan dalam penelitian. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga tahapan bersamaan: reduksi data (memilah, menyederhanakan, dan mentransformasi data dari berbagai sumber), penyajian data (visualisasi melalui teks deskriptif, diagram, dan peta konseptual), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang bersifat sementara hingga ditemukan bukti kuat yang mendukung.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan waktu untuk menguji keandalan data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu berbeda, penggunaan referensi penunjang untuk mendukung temuan data, serta peningkatan ketekunan dalam pengamatan

yang cermat dan berkesinambungan. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai dokumen dan laporan, sedangkan triangulasi waktu memastikan konsistensi data melalui pengecekan pada periode yang berbeda untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan valid.

PEMBAHASAN

Periode 2021-2025 diwarnai ketegangan berulang antara Israel dan Palestina, dipicu eskalasi Mei 2021 akibat rencana pengusiran warga Sheikh Jarrah dan bentrokan di kompleks Masjid Al-Aqsa saat Ramadan (CNN Indonesia, 2021). Situasi berkembang menjadi pertempuran 11 hari antara Hamas dan Israel, melibatkan ribuan roket dari Gaza dan serangan udara Israel yang merusak infrastruktur sipil. Meski Mesir memediasi gencatan senjata, kekerasan sporadis terus berlanjut di 2022.

Tahun 2022 mencatat salah satu periode paling mematikan dalam satu dekade: 150+ warga Palestina dan 20+ warga Israel tewas. Israel memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat/Yerusalem Timur (dari ±900 unit di 2021 menjadi 3.100+ unit di 2022), memicu bentrokan di Jenin dan Nablus, termasuk tewasnya jurnalis Shireen Abu Akleh (Berlianto, 2022). Muncul kelompok perlawanan baru di Tepi Barat, mayoritas milisi muda independen dari faksi besar. Memasuki 2023, blokade diperketat dan operasi militer Israel meningkat, menewaskan puluhan orang tiap bulan. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan besar: >5.000 roket, infiltrasi ke Israel selatan, dan penyerangan saat warga merayakan Sukkot. Serangan menewaskan ±1.200 orang (mayoritas sipil) dan 250+ sandera diambil. Hamas menyatakan aksi ini sebagai perlawanan terhadap blokade 17 tahun, ekspansi permukiman, dan kekerasan di Tepi Barat. Israel merespons dengan deklarasi perang dan Operasi Pedang Besi serangan udara besar, pengepungan total Gaza, serta invasi darat akhir Oktober 2023.

Tahun 2024, perang berkepanjangan menyebabkan >46.000 warga Palestina tewas (banyak perempuan/anak), termasuk 1.400+ tenaga medis dan 232 jurnalis (Planasari, 2025). Pada Maret 2025, serangan udara Israel menewaskan 400+ orang dalam satu malam, memicu kecaman internasional. Setelah 15 bulan perang, gencatan senjata dicapai 19 Januari 2025 lewat mediasi Qatar, Mesir, dan AS (Fathanah Arbar, 2025). Kesepakatan gencatan senjata dibagi tiga tahap:

Tahap I: Hentikan permusuhan 6 minggu, Hamas bebaskan 33 sandera, Israel bebaskan ±2.000 tahanan Palestina; IDF mundur 700 m dari area padat penduduk; bantuan masuk hingga 600 truk/hari; korban luka dapat berobat ke luar.

Tahap II: Perundingan menuju gencatan senjata permanen; pembebasan sandera laki-laki/militer; Israel bebaskan tahanan tambahan; penarikan penuh IDF dari Gaza termasuk Koridor Philadelphi; warga kembali ke utara Gaza; perluasan bantuan dan rekonstruksi awal.

Tahap III: Pertukaran jenazah; rekonstruksi besar Gaza (3-5 tahun) diawasi komite Mesir-Qatar-PBB; mekanisme pemantauan keamanan; pembukaan bertahap jalur perbatasan.

Keberhasilan tahap lanjut sangat tergantung konsistensi pelaksanaan awal dan komitmen politik kedua pihak. Konflik berakar pada era Mandat Inggris pasca-Perang Dunia I, dimulai dari Deklarasi Balfour (1917) yang mendukung tanah air Yahudi di Palestina. Migrasi Yahudi besar-besaran memicu penolakan Arab Palestina. Pada 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah (negara Yahudi dan Arab), ditolak pihak Arab. Israel memproklamasikan kemerdekaan (14 Mei 1948), memicu perang dengan negara-negara Arab. Kemenangan Israel memperluas wilayah dan memicu eksodus 700.000+ warga Palestina (Al Nakba). Perang Enam Hari (1967) membuat Israel menguasai Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Gerakan perlawanan memuncak pada Intifada I (1987) dan II (2000), dipicu pendudukan, kegagalan diplomasi, dan provokasi seperti kunjungan Ariel Sharon ke Al-Aqsa.

Perjanjian Oslo (1993 & 1995) memberi harapan, tetapi terhambat pergantian pemerintahan, oposisi ekstremis, dan pembunuhan PM Yitzhak Rabin.

Pemilu 2006 membawa Hamas menang mayoritas, menggeser dominasi Fatah. Persaingan berujung bentrokan bersenjata 2007, memisahkan otoritas: Hamas di Gaza, Fatah di Tepi Barat. Fragmentasi politik ini melemahkan posisi Palestina dalam negosiasi. Israel memanfaatkan situasi untuk menolak perundingan, sambil memperketat blokade Gaza.

Serangan Hamas 2023 membuat Otoritas Palestina terpinggirkan, memperdalam perpecahan internal. Sepanjang 2024, perang meluas, korban meningkat, dan fragmentasi menghambat distribusi bantuan. Gencatan senjata Januari 2025 mencakup penghentian operasi, pertukaran sandera/tahanan, dan rekonstruksi bertahap, namun implementasinya terancam ketegangan Hamas-Fatah. Sepanjang 2021-2025, upaya damai melibatkan PBB, Qatar, Mesir, dan AS. PBB menyerukan perlindungan sipil dan penghentian kekerasan, namun resolusinya sering diabaikan Israel. Kesepakatan gencatan senjata 2023 dan 2025 dicapai berkat mediasi regional dan internasional. Hambatan utama: fragmentasi internal Palestina yang menghalangi representasi tunggal, membuat Israel sulit diajak negosiasi substantif. Prospek perdamaian tergantung rekonsiliasi faksi, dukungan internasional pada solusi dua negara, dan keseriusan implementasi gencatan senjata 2025.

Peran Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina 2021–2025

Indonesia memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif, menolak kolonialisme, dan mendukung kemerdekaan Palestina secara konsisten sejak KAA 1955. Dalam periode 2021-2025, Indonesia aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina di forum internasional, khususnya PBB, OKI, dan GNB, menegaskan pentingnya solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Saat eskalasi Mei 2021, Indonesia mengutuk keras kekerasan Israel di Sheikh Jarrah dan Masjid Al-Aqsa, menyerukan gencatan senjata segera. Indonesia bersama negara OKI mengajukan resolusi ke Majelis Umum PBB yang mendesak perlindungan internasional bagi warga Palestina.

Di 2022, Indonesia mengecam lonjakan pembangunan permukiman ilegal Israel dan pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh, menyebutnya pelanggaran hukum humaniter. Indonesia juga menyuarakan dukungan terhadap investigasi independen oleh Dewan HAM PBB. Eskalasi Oktober 2023 memicu respons diplomatik intensif: Indonesia mengutuk serangan terhadap warga sipil baik oleh Hamas maupun Israel, namun menegaskan akar masalah adalah pendudukan ilegal dan blokade Gaza (Muhaimin, 2025). Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret, termasuk pengiriman misi kemanusiaan. Indonesia memanfaatkan perannya di OKI untuk menggalang dukungan negara anggota dalam menekan Israel, serta berpartisipasi dalam sidang darurat OKI di Jeddah pada Oktober 2023. Di forum GNB, Indonesia mengusulkan deklarasi bersama mendukung gencatan senjata dan peningkatan bantuan kemanusiaan. Fokus utama Indonesia adalah bantuan kemanusiaan. Sepanjang 2021-2025, Indonesia menyalurkan bantuan melalui jalur bilateral dan multilateral, melibatkan Kementerian Luar Negeri, BAZNAS, PMI, dan NGO. Bantuan mencakup:

Bantuan Medis:

- Pengiriman obat-obatan, peralatan bedah, dan kit kesehatan darurat.
- Donasi ambulans dan perlengkapan rumah sakit lapangan di Gaza.
- Pelatihan tenaga medis Palestina bekerja sama dengan RS di Indonesia.

Bantuan Pangan dan Kebutuhan Dasar:

- Pengiriman paket pangan siap saji, air bersih, dan perlengkapan sanitasi.
- Distribusi melalui UNRWA dan Bulan Sabit Merah Palestina.

Bantuan Infrastruktur dan Rehabilitasi:

- Dukungan untuk rekonstruksi sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum yang hancur.
- Program beasiswa bagi pelajar Palestina terdampak perang.

Diplomasi Kemanusiaan:

- Mendorong resolusi Majelis Umum PBB terkait akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.
- Memfasilitasi jalur evakuasi medis melalui Mesir untuk korban luka berat.

Pasca serangan 7 Oktober 2023, Indonesia meningkatkan bantuan: Oktober-Desember 2023: 51 ton bantuan kemanusiaan diterbangkan ke Mesir, meliputi obat, tenda, pakaian, dan makanan siap saji. 2024: dua kali pengiriman tambahan total 80 ton bantuan, plus dana USD 2 juta untuk operasi kemanusiaan di Gaza. Indonesia juga memfasilitasi evakuasi WNI dari Gaza dan membantu evakuasi terbatas warga Palestina berkebutuhan medis darurat.

Saat gencatan senjata Januari 2025, Indonesia mengumumkan paket bantuan jangka panjang senilai Rp 250 miliar untuk rekonstruksi Gaza, difokuskan pada pembangunan kembali rumah sakit, fasilitas air bersih, dan pusat rehabilitasi trauma anak.

Strategi Pendekatan Indonesia

Indonesia menggunakan pendekatan tiga jalur:

- a. Diplomasi Politik: menekan Israel lewat forum multilateral dan bilateral; menggalang dukungan negara OKI dan GNB; memanfaatkan hubungan baik dengan Mesir dan Qatar sebagai mediator.
- b. Bantuan Kemanusiaan Terukur: memastikan bantuan tepat sasaran melalui mitra terpercaya seperti UNRWA dan Bulan Sabit Merah, meminimalkan hambatan distribusi akibat blokade.
- c. Penguatan Kapasitas Palestina: pelatihan tenaga medis, pemberian beasiswa, dan bantuan teknis di bidang pendidikan dan kesehatan.

Tantangan dalam Implementasi

- a. Akses Terbatas: blokade Gaza dan pembatasan gerak oleh Israel menghambat distribusi bantuan.
- b. Keamanan Lapangan: risiko tinggi bagi tenaga bantuan dan distribusi di zona konflik.
- c. Fragmentasi Politik Palestina: koordinasi bantuan terhambat perpecahan Hamas-Fatah.
- d. Birokrasi Internasional: proses penyaluran bantuan melalui jalur multilateral sering memakan waktu lama.

Dampak dan Analisis Peran Indonesia

1. Dampak Bantuan Kemanusiaan Indonesia

Bantuan Indonesia selama 2021-2025 memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi korban perang di Palestina, meskipun bersifat parsial karena keterbatasan akses dan skala. Dampak utamanya:

- Penyelamatan Nyawa: bantuan medis (obat-obatan, ambulans, tenaga medis) memungkinkan perawatan cepat bagi korban luka parah.
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar: paket pangan dan air bersih membantu mencegah kelaparan, khususnya selama pengepungan Gaza pasca Oktober 2023.
- Pemulihan Infrastruktur: program rekonstruksi rumah sakit dan sekolah mulai berjalan pasca gencatan senjata 2025.

- Trauma Healing: program rehabilitasi anak dan dukungan psikososial membantu meringankan dampak psikologis perang.

Namun, dampak jangka panjang masih terbatas karena intensitas konflik yang tinggi, kerusakan luas, dan hambatan distribusi.

2. Analisis Pendekatan Diplomasi Indonesia

Pendekatan Indonesia dinilai konsisten dan sesuai politik luar negeri bebas aktif. Strateginya memadukan:

- Advokasi Internasional: terus menekan Israel di forum PBB dan OKI, memanfaatkan posisi sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar.
- Kemitraan Regional: bekerja sama dengan Mesir dan Qatar sebagai jalur utama bantuan masuk Gaza.
- Penguatan Peran di GNB: memanfaatkan solidaritas negara-negara non-blok untuk memperkuat dukungan internasional.
- Keberhasilan terlihat dari pengakuan berbagai pihak terhadap kontribusi Indonesia, meskipun pengaruhnya terbatas dalam mengubah kebijakan Israel.

3. Perbandingan dengan Periode Sebelumnya

Dibanding periode sebelum 2021, bantuan Indonesia pasca-2021 lebih terstruktur dan terukur: Sebelum 2021: bantuan bersifat simbolik dan event-based, misalnya saat serangan besar 2008–2009 atau 2014. 2021-2025: ada kesinambungan bantuan, pembagian ke dalam program medis, pangan, pendidikan, dan rekonstruksi, plus integrasi diplomasi kemanusiaan. Perubahan ini menunjukkan peningkatan kesadaran pemerintah bahwa peran Indonesia di Palestina harus berkelanjutan, bukan reaktif.

4. Hambatan yang Dihadapi

- Politik Internal Palestina: perpecahan Hamas-Fatah menyulitkan koordinasi bantuan.
- Sikap Israel: penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam misi kemanusiaan langsung.
- Resistensi Politik Global: veto AS di Dewan Keamanan PBB membatasi ruang diplomasi formal.
- Keterbatasan Sumber Daya: meskipun bernilai besar, bantuan Indonesia masih kalah skala dibanding negara donor besar.

5. Peluang Penguatan Peran

- Berdasarkan analisis, ada ruang penguatan peran Indonesia:
- Menginisiasi Koalisi Negara Donor OKI: untuk memastikan distribusi bantuan bersama yang lebih besar dan terkoordinasi.
- Peningkatan Bantuan Berbasis Teknologi: *telemedicine*, pendidikan jarak jauh, dan platform koordinasi bantuan daring.
- Pendekatan *People to People Diplomacy*: melibatkan NGO, universitas, dan komunitas untuk dukungan jangka panjang.

6. Studi Kasus Implementasi Bantuan

Bantuan 51 Ton Oktober 2023: dikirim via Bandara El-Arish, Mesir, terdiri dari makanan, obat, dan tenda (Al Fardi, 2023). Penyaluran dilakukan oleh Bulan Sabit Merah Mesir untuk masuk ke Gaza. Tantangan: penundaan di perbatasan Rafah akibat prosedur keamanan Israel. Program Beasiswa 2024: 100 pelajar Palestina diterima di universitas Indonesia dengan skema biaya penuh. Tujuan: membentuk generasi terdidik untuk masa depan Palestina. Rehabilitasi RS Al-Shifa: kerja sama Kemenkes RI dan NGO internasional untuk memperbaiki fasilitas yang rusak berat. Peran Indonesia dalam menangani korban perang di Palestina pada

periode 2021-2025 memperlihatkan konsistensi kebijakan luar negeri bebas aktif yang berpihak pada kemanusiaan. Indonesia tidak hanya mengutuk tindakan kekerasan dan pendudukan yang dilakukan Israel, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam bentuk bantuan kemanusiaan yang terstruktur. Pendekatan ini memperkuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian global dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun skala bantuan tidak sebesar negara donor utama, keberadaan Indonesia memiliki nilai strategis karena membawa legitimasi moral dari negara berpenduduk Muslim terbesar dan anggota aktif berbagai forum internasional.

Bantuan kemanusiaan yang disalurkan Indonesia mencakup berbagai sektor krusial. Di sektor kesehatan, pengiriman obat-obatan, peralatan medis, dan ambulans menjadi salah satu prioritas, terutama pada masa-masa puncak konflik ketika fasilitas kesehatan di Gaza mengalami kerusakan parah. Indonesia juga mengirimkan tim medis sukarela melalui kerja sama dengan lembaga kemanusiaan internasional, yang memberikan layanan darurat dan pelatihan kepada tenaga medis setempat. Pada saat yang sama, sektor pendidikan mendapat perhatian melalui pemberian beasiswa bagi pelajar Palestina serta bantuan untuk membangun kembali sekolah yang hancur akibat serangan. Di bidang kebutuhan dasar, pengiriman paket pangan, air bersih, dan perlengkapan sanitasi dilakukan secara berkala untuk mencegah krisis kelaparan dan wabah penyakit di daerah terdampak.

Pendekatan Indonesia tidak semata-mata mengandalkan jalur distribusi bantuan, tetapi juga melibatkan diplomasi kemanusiaan untuk memastikan akses dan keberlanjutan program. Melalui forum PBB, OKI, dan GNB, Indonesia mendesak agar akses kemanusiaan ke Gaza dibuka tanpa hambatan, sekaligus mendorong negara-negara donor lain untuk menyalurkan bantuan lebih besar (Primayanti, 2025). Dalam berbagai kesempatan, Indonesia juga menyampaikan posisi tegas bahwa penyelesaian konflik memerlukan penghentian pendudukan ilegal dan penerapan solusi dua negara. Sikap ini memperkuat pesan bahwa bantuan kemanusiaan bukanlah pengganti penyelesaian politik, melainkan bagian dari upaya komprehensif menuju perdamaian yang adil.

Walaupun demikian, implementasi bantuan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Blokade yang diberlakukan Israel di Gaza membatasi masuknya bantuan, sehingga distribusi sering kali tertunda atau terhambat di perbatasan. Situasi keamanan yang tidak stabil membuat tenaga kemanusiaan menghadapi risiko tinggi, termasuk ancaman serangan di wilayah distribusi. Fragmentasi politik internal Palestina antara Hamas dan Fatah juga menghambat koordinasi penyaluran bantuan, sementara prosedur birokrasi internasional memperlambat proses pencairan dana dan pengiriman logistik. Semua hambatan ini memerlukan strategi adaptif agar bantuan dapat tetap menjangkau penerima yang membutuhkan. Dalam konteks teori hubungan internasional, peran Indonesia dapat dianalisis melalui empat kerangka utama. Liberalisme tercermin dari upaya Indonesia membangun kerja sama multilateral dan melibatkan aktor non-negara dalam distribusi bantuan. Konsep kebijakan luar negeri bebas aktif terlihat dari keseimbangan Indonesia antara menjaga kedaulatan sikap politik dan keterlibatan aktif di isu global. Teori diplomasi relevan karena Indonesia menggabungkan diplomasi bilateral dengan negara kunci seperti Mesir dan Qatar, serta diplomasi multilateral melalui forum internasional. Sementara itu, konsep human security menjadi inti dari pendekatan Indonesia, yang tidak hanya fokus pada perlindungan dari kekerasan fisik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kesehatan, pendidikan, dan pemulihan martabat manusia.

Hasil yang dicapai selama periode ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai aktor penting dalam isu Palestina. Bantuan kemanusiaan yang diberikan, walaupun terbatas secara materi dibandingkan donor besar,

membawa dampak nyata bagi korban perang, baik dalam penyelamatan nyawa, pemulihan infrastruktur, maupun dukungan psikososial. Di sisi lain, diplomasi Indonesia berkontribusi menjaga isu Palestina tetap menjadi perhatian internasional, mencegahnya tenggelam oleh isu global lain. Keberhasilan ini juga didukung oleh reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina sejak awal berdirinya.

Namun, efektivitas peran tersebut tetap bergantung pada kemampuan Indonesia mengatasi tantangan eksternal dan internal. Dukungan politik dari negara-negara sahabat perlu terus diperkuat, baik melalui koalisi regional di OKI maupun solidaritas di GNB. Di tingkat teknis, inovasi dalam penyaluran bantuan seperti pemanfaatan teknologi digital untuk koordinasi logistik dan *telemedicine* dapat meningkatkan efisiensi distribusi di zona konflik. Selain itu, membangun mekanisme kerja sama langsung antara lembaga kemanusiaan Indonesia dan organisasi masyarakat sipil Palestina dapat meminimalkan hambatan birokrasi internasional.

Secara keseluruhan, peran Indonesia dalam menangani korban perang di Palestina pada 2021-2025 menegaskan pentingnya kombinasi antara bantuan kemanusiaan dan diplomasi politik. Upaya ini bukan hanya tentang memberikan bantuan fisik, tetapi juga memperjuangkan hak rakyat Palestina di panggung internasional. Walaupun kontribusinya belum mampu mengubah secara drastis situasi politik dan keamanan di Palestina, Indonesia telah menunjukkan bahwa konsistensi, solidaritas, dan pendekatan berbasis kemanusiaan dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung masyarakat yang hidup di tengah konflik berkepanjangan. Dengan mempertahankan dan memperluas peran ini, Indonesia berpotensi menjadi salah satu penggerak utama dukungan internasional bagi Palestina di masa depan.

KESIMPULAN

Indonesia menempati posisi strategis dalam penanganan krisis kemanusiaan akibat konflik Israel–Palestina melalui pendekatan diplomasi kemanusiaan yang komprehensif—mengintegrasikan peran negara, masyarakat sipil, dan jejaring kerja sama internasional. Sepanjang periode 2021 hingga 2025, Indonesia secara aktif menyalurkan bantuan medis dan logistik ke Jalur Gaza melalui berbagai lembaga nasional seperti Palang Merah Indonesia (PMI), MER-C, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Dompot Dhuafa. Di samping itu, pemerintah juga meluncurkan kampanye nasional *Indonesia untuk Palestina* yang menargetkan penggalangan dana sebesar Rp3,2 triliun untuk mendukung tahap tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi jangka panjang di Gaza.

Di ranah diplomatik, Indonesia konsisten menyerukan diberlakukannya gencatan senjata, penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, serta perlindungan terhadap warga sipil dalam berbagai forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia juga menunjukkan kepemimpinan aktif melalui partisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Palestina tahun 2025 bersama Italia, sekaligus memperkuat posisi moral di tingkat internasional dengan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan partisipasi publik nasional.

Efektivitas pengiriman bantuan turut ditingkatkan melalui kerja sama erat dengan lembaga internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Federasi Internasional Palang Merah (IFRC), dan Bulan Sabit Merah Palestina—memastikan bahwa proses distribusi bantuan dilakukan secara netral, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia hadir bukan hanya sebagai pemberi bantuan kemanusiaan, melainkan sebagai aktor global yang aktif, konsisten, dan bermartabat dalam mengadvokasi nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan solidaritas kemanusiaan di tengah krisis Israel–Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda FA, J. Q. (2019). GAGASAN HUMAN SECURITY DALAM KEBIJAKAN PERSONAL SECURITY TINJAUAN TERHADAP DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KEBIJAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG. *Responsive*, 2(1), 8. <https://doi.org/10.24198/responsive.v2i1.23016>
- Al Fardi, M. I. (2023, November 5). Pemerintah Indonesia Kirim 51,5 Ton Bantuan Logistik-Medis ke Palestina . *DetikJogja*. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7019563/pemerintah-indonesia-kirim-51-5-ton-bantuan-logistik-medis-ke-palestina>
- Alinea. (2023, November 3). Kenapa Arab kalah perang dari Israel pada 1948? *Alinea.Id*. <https://www.alinea.id/dunia/kenapa-arab-kalah-perang-dari-israel-pada-1948-b2ia09Pfu>
- Berlianto. (2022, May 12). Jurnalis Shireen Abu Akleh Tewas Ditembak, Palestina Tolak Investigasi Bersama Israel . *International SindoNews*. <https://international.sindonews.com/read/767497/43/jurnalis-shireen-abu-akleh-tewas-ditembak-palestina-tolak-investigasi-bersama-israel-1652349903/16>
- CNN Indonesia. (2021, May 10). 180 Luka dalam Bentrok Lanjutan Israel-Palestina di Yerusalem . *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210510153651-120-641007/180-luka-dalam-bentrok-lanjutan-israel-palestina-di-yerusalem>
- Fathanah Arbar, T. (2025, January 18). Sah! Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza Berlaku 19 Januari 2025. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250118152645-4-604205/sah-gencatan-senjata-israel-hamas-di-gaza-berlaku-19-januari-2025>
- Klein, M. (1996). Competing brothers: The web of Hamas-PLO relations. *Terrorism and Political Violence*, 8(2), 111–132. <https://doi.org/10.1080/09546559608427349>
- Muhaimin. (2025, August 10). Ini Sikap Resmi Indonesia atas Rencana Israel Caplok Gaza . *Internasional SindoNews*. <https://international.sindonews.com/read/1604505/43/ini-sikap-resmi-indonesia-atas-rencana-israel-caplok-gaza-1754784517>
- Mukhaer, A. A. (2023, October 11). Perang Enam Hari, Seteru Singkat Arab-Israel pada Sejarah Timur Tengah. *National Geographic Indonesia*. <https://nationalgeographic.grid.id/read/133913445/perang-enam-hari-seteru-singkat-arab-israel-pada-sejarah-timur-tengah?page=all>
- Planasari, S. (2025, April 5). Jumlah Korban Tewas di Gaza Lampau 50.600 Orang akibat Serangan Israel. *Tempo*. https://www.tempo.co/internasional/jumlah-korban-tewas-di-gaza-lampau-50-600-orang-akibat-serangan-israel-1227609#goog_rewarded
- Primayanti. (2025, April 14). PBB desak akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/4776489/pbb-desak-akses-kemanusiaan-tanpa-hambatan-di-seluruh-gaza>